

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SANKSI UNI EROPA
TERHADAP RUSIA PASCA ANEKSASI KRIMEA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RISHA AMALIA DWIYANTI

1732312

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SANKSI UNI EROPA
TERHADAP RUSIA PASCA ANEKSASI KRIMEA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RISHA AMALIA DWIYANTI

17323121

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SANKSI UNI EROPA
TERHADAP RUSIA PASCA ANEKSASI KRIMEA TAHUN 2014-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

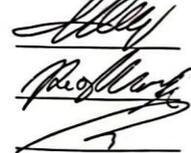
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.


Dewan Penguji

- 1 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

14 Maret 2024



Risha Amalia Dwiyantri

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
Keywords: Sanctions, European Union, Russia, Crimean annexation	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Proses Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2	15
Sejarah Rusia, Ukraina, Krimea, dan Struktur Uni Eropa	15
2.1 Konflik antara Rusia dan Ukraina atas Aneksasi di Krimea	15
2.2 Uni Eropa	25
Parlemen Eropa.....	26
Dewan Eropa.....	27
Dewan Uni Eropa.....	28
Komisi Eropa	29
BAB 3	31
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENERAPAN SANKSI UNI EROPA TERHADAP RUSIA PASCA ANEKSASI KRIMEA TAHUN 2014	31

3.1	Proses Pengambilan Keputusan dalam Penerapan Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Pasca Aneksasi Krimea	31
3.1.1	Stakeholder	32
3.1.2	Action channel.....	34
3.1.3	Resultant.....	36
3.1.4	Lever of manipulator.....	36
3.1.5	Coalitions	42
3.1.6	Subversion and Equalizer.....	44
3.1.7	The games	45
BAB 4	51
KESIMPULAN DAN SARAN	51
4.1	Kesimpulan.....	51
4.2	Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Perjanjian Bersatunya Wilayah Republik Krimea
Sdan Kota Sevastopol dengan Rusia pada tanggal 18 Maret

ABSTRAK

Permasalahan penganeksasian Rusia terhadap Krimea yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh hal-hal yang melatarbelakangi Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea. Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mendalami permasalahan ini pertama, didasarkan pada realitas politik bahwa aneksasi merupakan kejadian yang jarang terjadi, terutama pada abad melenium seperti sekarang ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* Valerie M. Hudson pada kategori *Bureaucratic Politics*. Argumen sementara dalam penelitian ini bahwa penerapan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia bahwa sanksi tersebut merupakan kebijakan yang di ambil Uni Eropa pasca terjadinya aneksasi Krimea pada tahun 2014. Temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pasca aneksasi krimea tahun 2014 maka terdapat kesimpulan bahwa proses penerapan sanksi Uni Eropa masuk ke dalam *Bureaucratic Politics* karena Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional memberikan sanksi kepada Rusia sebagai respon atas aneksasi yang dilakukan Rusia di Krimea. Dalam konsep *Bureaucratic Politics* memiliki dua fokus utama dalam menganalisis sebuah keputusan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Fokus utama yang pertama adalah berisikan tentang model pengambilan keputusan suatu negara dengan melihat model birokrasi dari negara tersebut. Konsep *Bureaucratic Politics Models* memiliki delapan variabel yang digunakan untuk menentukan sebuah keputusan. Delapan variabel tersebut terdiri setiap proses birokrasi suatu keputusan negara yang dilihat dari: *stakeholder, action channels, framing resultans, levers of manipulation, koalisi, subversi dan equalizer dan the games*.

Kata kunci: Sanksi, Uni Eropa, Rusia, Aneksasi Krimea

ABSTRACT

The problem of Russia's annexation of Crimea is an attraction for the author to examine further the reasons behind Russia's annexation of Crimea. There are several reasons that are attractive for the author to explore this problem. Firstly, it is based on the political reality that annexation is a rare event, especially in the current millennium century. The framework for thinking in this research uses Valerie M. Hudson's Foreign Policy Analysis theory in the Bureaucratic Politics category. Bureaucratic Politics. The temporary argument in this research is that the application of European Union sanctions against Russia is that these sanctions are a policy taken by the European Union after the annexation of Crimea in 2014. Research findings regarding the factors that influence European Union sanctions against Russia after the annexation of Crimea in 2014 are the conclusion that the process of implementing European Union sanctions falls into Bureaucratic Politics because the European Union as an International Organization imposed sanctions on Russia in response to Russia's annexation of Crimea. The concept of Bureaucratic Politics has two main focuses in analyzing a country's foreign policy decisions. The first main focus is on the decision-making model of a country by looking at the bureaucratic model of that country. The Bureaucratic Politics Models concept has eight variables that are used to determine a decision. These eight variables consist of every bureaucratic process of a state decision as seen from: stakeholders, action channels, framing resultants, levers of manipulation, coalitions, subversion and equalizers and the games.

Keywords: Sanctions, European Union, Russia, Crimean annexation

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidakmampuan pemerintah Ukraina untuk memenuhi tugasnya telah menyebabkan perang internal di dalam negeri. Karena melibatkan banyak pihak-termasuk pihak-pihak yang berselisih dan pihak lain yang melihat adanya bahaya bagi perdamaian dan keamanan-termasuk, pada akhirnya, Ukraina-konflik ini, yang bermula dari perselisihan internal, meningkat menjadi konflik antar negara, dalam hal ini Rusia. Ada keretakan antara Rusia dan Ukraina karena mayoritas etnis Rusia di Krimea dianiaya oleh pemerintah Ukraina yang baru setelah kudeta inkonstitusional yang dipimpin oleh Victor Yanukovich. Akibatnya, banyak dari orang-orang Rusia ini menginginkan Krimea kembali ke Rusia sehingga mereka dapat kembali diperintah oleh tanah airnya.

Rusia mengirim tentara ke Krimea pada tanggal 1 Maret 2014, dalam sebuah intervensi militer. Izin parlemen dari Federasi Rusia diperlukan agar hal ini dapat dilakukan (Mamfaluthy, 2014). Bandara di Sevastopol dan Simferopol juga telah dikuasai oleh pasukan Rusia. Ada yang berpendapat bahwa Rusia telah mempertahankan kekuasaan de facto atas Krimea. Karena krisis di Ukraina, Rusia memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer untuk melakukan intervensi. Perang pecah ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa. Bekerja sama dengan Rusia adalah sesuatu yang lebih menarik bagi Yanukovych. Dengan demikian, keputusan ini memunculkan keuntungan dan kerugian dalam masyarakat Ukraina.

Protes di Kiev membantu menggulingkan Viktor Janukovich, presiden Ukraina dan seorang pendukung Moskow, pada Februari 2014. Akibat tekanan dari Rusia, Janukovich sebelumnya menolak menandatangani perjanjian asosiasi antara Uni Eropa dan Ukraina. Banyak orang yang sudah menantikan untuk menjadi anggota Uni Eropa ketika mereka mendengar penolakan tersebut. Selain itu, Viktor Janukovich dan pejabat pemerintah lainnya dituduh melakukan korupsi; ia akhirnya melarikan diri ke Rusia. Akibatnya, Rusia mengirim pasukan ke semenanjung Krimea. Rusia mendukung separatis di wilayah Donbas, wilayah yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia di Ukraina timur, selama pemberontakan mereka setelah mencaplok Krimea (DW, 2022).

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pada tanggal 4 Maret 2014, bahwa mengirimkan angkatan bersenjata ke Krimea, Ukraina, akan menjadi pilihan terakhir. Putin menambahkan bahwa Rusia dapat dan akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi warga Ukraina keturunan Rusia dari kekerasan di negara asal mereka. Mengaku sebagai pasukan pertahanan diri lokal, ia membantah laporan bahwa pria dan wanita berseragam yang terlihat berjalan-jalan di sekitar Krimea tanpa simbol nasional sebenarnya adalah tentara Rusia. Rusia dan seluruh dunia berada dalam bahaya secara ekonomi dan militer akibat tindakan Vladimir Putin (Abi, Landra, and Utari, 2015).

Aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, salah satunya yaitu Uni Eropa dan Amerika. Ada beberapa reaksi dari berbagai pihak, yaitu melakukan kecaman terhadap aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea dan memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Salah satu sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia, yaitu pemberlakuan

sanksi ekonomi (perdagangan) terhadap Rusia. Kebijakan dalam memberlakukan sanksi terhadap Rusia menyebabkan hubungan antara Rusia dan beberapa pihak lain memburuk, pasca aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea.

Rusia dikenakan enam putaran sanksi oleh Uni Eropa setelah invasi mereka ke Krimea pada 16 Maret 2014. Sebelum mencaplok Krimea, Putin tentu saja sangat memikirkan langkah Uni Eropa ini. Putin jelas tidak berniat melepaskan kendali atas wilayah ini, yang mempertahankan ikatan budaya yang kuat dengan Rusia meskipun ada sanksi yang dijatuhkan oleh banyak negara sekutu termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rusia akan mengalami kerugian besar secara ekonomi jika mencaplok wilayah ini, namun hal ini juga akan memperkuat statusnya sebagai kekuatan regional di Eropa Timur. Uni Eropa telah mengambil sikap tegas terhadap campur tangan Rusia dalam sengketa wilayah antara Ukraina dan Rusia sejak awal Maret 2014, ketika mereka mulai menerapkan sanksi ekonomi dan diplomatik.

Banyak kelompok berbeda di Uni Eropa mempunyai pendapat berbeda mengenai perlu atau tidaknya menjatuhkan sanksi. Akibat hubungan dagang yang kuat dengan Rusia, banyak dari negara-negara tersebut ragu-ragu untuk memutuskan hubungan dengan mitra dagang utama mereka. Untuk mencapai tujuan “Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama” (CFSP), yang mencakup demokrasi, perdamaian, dan penghormatan terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia, dan hukum internasional, Uni Eropa menerapkan sanksi, sebagaimana tercantum dalam Lembar Fakta tentang Tindakan Pembatasan UE. Sebagai bagian dari strategi politik yang lebih holistik untuk membawa perubahan politik di negara target dalam hal ini Rusia Uni Eropa telah menerapkan sanksi-sanksi ini. Sanksi yang menargetkan individu dan organisasi yang terlibat dalam konflik Rusia-

Ukraina bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan pembatasan tersebut terhadap rakyat Rusia (Shagina, 2017).

Sebagai kelompok negara-negara Eropa yang terintegrasi secara regional, Uni Eropa (UE) mengambil peran penting dalam memediasi krisis antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina secara resmi tidak menjadi bagian dari UE, meskipun mereka berbatasan dengan Eropa dan terletak di wilayah yang sama. Oleh karena itu, UE terpaksa mengambil tindakan sehubungan dengan krisis yang terjadi saat ini. Setelah peristiwa ini, Uni Eropa mengakui pemerintah Ukraina yang baru terpilih dan mendukung aktivitas rakyat Ukraina. Sanksi dijatuhkan kepada Rusia dan kelompok pro-Rusia tertentu di Ukraina dan Krimea sebagai respons terhadap aktivitas Rusia (Eropa, 2016). Salah satu pendekatan untuk memberikan tekanan pada Rusia dan membuat mereka mengakhiri konflik dengan Ukraina adalah dengan melihat apa yang dilakukan UE terhadap Rusia.

Uni Eropa melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik, dan hal ini menunjukkan relevansinya. Pelatihan manajemen konflik untuk polisi, bantuan pertahanan dari militer, dan dukungan mediasi untuk perjanjian seperti Perjanjian Jenewa, Protokol Minsk, dan KTT Normandia merupakan bagian dari upaya ini. Hal ini dapat menyebabkan Uni Eropa terlibat dalam konflik yang berkelanjutan sebagai pihak ketiga (Ruziq, 2022).

Aneksasi tersebut juga menimbulkan dampak yang cukup besar untuk Ukraina, Krimea, dan Rusia. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari aneksasi tersebut, yaitu banyak penduduk sipil yang menjadi korban jiwa ketika terjadi invasi dan aneksasi oleh Rusia terhadap Krimea. 5.086 penduduk sipil menjadi korban jiwa dan 10.948 terluka dalam insiden tersebut dan terhitung sejak April 2014

hingga Januari 2015 (United Nation, 2015). Ratusan penduduk sipil di Ukraina juga terpaksa mengungsi ke wilayah lain setelah situasi di Ukraina semakin buruk. Berbagai pihak juga menanggapi aneksasi tersebut dengan berbagai reaksi terhadap Rusia. Salah satu reaksi dari beberapa pihak, yaitu memberlakukan sanksi terhadap Rusia

Mengingat gawatnya situasi ini, penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih jauh bagaimana reaksi berbagai pihak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana proses pembuatan sanksi dan penerapan sanksi dari Uni Eropa terhadap Rusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut analisis yang akan dilakukan dengan memanfaatkan rumusan masalah pada penjelasan latar belakang penulis: “Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penerapan sanksi dari Uni Eropa terhadap Rusia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini didasarkan pada rumusan masalah yang diberikan di atas:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembuatan sanksi terhadap Rusia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi terhadap Rusia
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektifitas pemberlakuan sanksi oleh Uni Eropa terhadap Rusia

1.4 Cakupan Penelitian

Studi ini akan fokus terhadap beberapa hal, salah satunya yaitu sejarah singkat antara Rusia, Ukraina, dan Krimea. Penelitian membahas proses pengambilan keputusan dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Rusia pasca aneksasi Krimea dalam rentan waktu 2014-2019. Rentan waktu tersebut diberlakukan, karena kebijakan tentang penerapan sanksi yang dilakukan oleh Uni Eropa terjadi perkembangan setelah melalui modifikasi hingga di tahun 2019.

1.5 Tinjauan Pustaka

Meninjau literatur sebelumnya mengenai peran Rusia dalam Krisis Krimea, sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa sebagai tanggapan atas tindakan Rusia, dan tanggapan Rusia terhadap sanksi tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi referensi dan menulis penelitian ini. *Economic Sanctions Reconsidered*, sebuah buku karya HSEO (Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, dan Barbara Oegg) (Hufbauer et al., 2007), merupakan literatur pertama dalam tinjauan Pustaka.

Buku ini menggali mekanisme sanksi ekonomi dan bagaimana sanksi tersebut dapat digunakan untuk memaksa negara tertentu mengubah kebijakan ekonominya. Selain itu, HSEO bertujuan untuk menyediakan metodologi dalam buku ini untuk menentukan keefektifan hukuman ekonomi yang dikenakan pada suatu pihak, biasanya negara. *Sanksi Ekonomi yang Dipertimbangkan Kembali* menawarkan kerangka kerja untuk mengevaluasi keefektifan sanksi UE terhadap Rusia, yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

literatur kedua berjudul “*The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics*” (Yesilot, 2014) penulis menganalisis peran Rusia dalam membentuk krisis ini sejak krisis tersebut dimulai pada tahun 1990-an. Upaya untuk menghasut pemberontakan di kalangan warga Krimea keturunan Rusia terhadap pemerintah tampaknya melibatkan tiga belas tokoh politik terkemuka Rusia. Ukraina dan ingin Krimea bergabung dengan Rusia dengan mengklaim kemerdekaan. Selain itu, artikel ini menggali alasan di balik aneksasi Krimea oleh Rusia, yang merupakan kepentingan geopolitik Rusia di wilayah Laut Hitam. Penulisan penelitian ini menjadi lebih mudah dengan membaca artikel ini, yang memberikan latar belakang peran Rusia dalam Krisis Krimea dan tujuan geopolitik Rusia yang mengarah pada aneksasi Krimea.

literatur ketiga berjudul mengarang karya sastra ketiga berjudul *Whose Crime?* (Charron, 2016). Otoritas yang Disengketakan dan Identifikasi Geografis. Tujuan utama halaman ini adalah untuk menyajikan sinopsis situasi terkini mengenai kepemilikan Krimea. Krimea telah menjadi wilayah kontroversial antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 1991, sebagaimana dijelaskan oleh (Charron, 2016). Konfrontasi pasti akan muncul antara kedua negara karena sama-sama menegaskan kedaulatan sah mereka atas Krimea. Informasi mengenai sengketa Krimea dan pernyataan Rusia dan Ukraina mengenai wilayah tersebut disajikan di halaman ini.

Ketiga literatur tersebut memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama membahas terkait konflik Ukraina dan Rusia atas Krimea dan membahas terkait pemberian sanksi pasca adanya aneksasi Krimea terhadap Rusia. Sedangkan ketiga tinjauan pustaka tersebut juga memiliki fokus yang berbeda, yaitu fokus membahas sejarah terjadinya aneksasi Krimea, dampak dari aneksasi Krimea oleh Rusia, dan

tanggapan dan reaksi dari beberapa pihak tentang aneksasi Krimea oleh Rusia serta kebijakan yang diambil Rusia pasca aneksasi tersebut. Namun, ketiga tinjauan pustaka tersebut belum membahas dampak dari aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea dalam aspek ekonomi dan geopolitik. Penelitian ini akan membahas dampak dari aneksasi Krimea oleh Rusia dari aspek ekonomi dan geopolitik. Penelitian ini akan menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* Valerie M. Hudson untuk menganalisis kasus yang akan dibahas. Penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2014-2019 saat terjadinya aneksasi Krimea.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Teori *Foreign Policy Analysis* Valerie M. Hudson

Studi ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana proses Uni Eropa dalam memberikan sanksi kepada Rusia setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014-2019 dengan mengkaji variabel-variabel yang berdampak pada sanksi tersebut dan menarik kesimpulan berdasarkan teori kebijakan luar negeri dan analisis kebijakan luar negeri Valerie M. Hudson.

1. *Input*

Faktor-faktor dalam negeri yang berdampak pada perkembangan kebijakan politik luar negeri menjadi pokok bahasan penjelasan ini. Dalam penelitian ini penulis mengambil *level of analysis* pada poin “*Group Decisionmaking*”. Dalam penelitian ini fokus penelitian penulis pada kategori *Bureaucratic Politics*.

Politik Birokrasi, yang merupakan kumpulan beragam kelompok pembuat kebijakan yang disatukan melalui pertemuan kelompok-kelompok yang lebih kecil, kelompok proses dalam organisasi yang mempunyai pengaruh di tingkat domestik, dan ciri-ciri unik dari masing-masing anggota kelompok tersebut. Birokrasi politik adalah titik temu yang kompleks dari dinamika kelompok kecil, proses organisasi, kekuatan politik dalam negeri, dan karakteristik pribadi individu yang relevan. Sebagian besar birokrasi politik terjadi dalam kelompok antarlembaga, yang merupakan salah satu sarana utama untuk mencapai tujuan-tujuan penting non-krisis, situasi yang harus ditangani dalam pemerintahan. Padahal posisi yang diambil oleh peserta dalam kelompok antarlembaga tersebut mungkin dapat diprediksi

secara kasar, memprediksi posisi mana yang akan menang terkadang mungkin, terkadang tidak mungkin, namun selalu merupakan perhitungan yang sangat rumit (Valerie M. Hudson, 2014).

Beberapa poin-poin yang menjadi kunci dalam politik birokrasi:
(Valerie M. Hudson, 2014)

a. *Stakeholder*

Stakeholder terkadang disebut “pemain”. Stakeholder adalah aktor yang mempunyai kepentingan peran, keahlian, wilayah, atau kekuatan politik belaka ditambah dengan kepentingan yang kuat untuk memungkinkan mereka dapat mempengaruhi hasil birokrasi.

b. *Action channels*

Aktor yang bekerja di birokrasi dengan menggunakan satu-satunya cara untuk menjadi pemain yang efektif adalah dengan mengetahui saluran tindakan siapa yang berhak bertindak dan kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan sesuatu. *Action channels* membahas bagaimana aktor berkoordinasi dalam proses kebijakan tersebut.

c. *Resultans*

Resultans adalah hasil dari sebuah kebijakan yang berdasarkan koordinasi dari semua aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut akan berkembang, namun tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang pertama kali dirancang oleh berbagai aktor.

d. *Levers of manipulation*

Levers of manipulation adalah proses manipulasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Para pemain politik yang efektif dalam birokrasi besar tidak hanya mengetahui semua dari *action channels* mereka juga ahli dalam memanipulasi birokrasi. Ada empat hal dalam proses manipulasi tersebut, yaitu *framing, rules, deadlines, information control, and agendas* untuk mencapai tujuan tertentu. *Framing* adalah Framing adalah proses aktor memahami suatu situasi dan menentukan tugas pengambilan keputusannya. *Rules* adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan; apakah keputusan tersebut berdasarkan suara mayoritas atau bukan. *Deadline* adalah batas waktu yang ditentukan oleh satu aktor terhadap aktor lain. *Control of information* adalah pemberian informasi terhadap aktor Ketika terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. *Agenda* adalah penentuan oleh satu aktor dalam berjalannya proses bagaimana kebijakan tersebut dapat terbentuk.

e. *Coalition*

Pembentukan koalisi yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Ada tiga hal dalam pembentukan koalisi, yaitu *compromise, quid pro quo arrangement, dan Implicit or explicit coercion*. *Compromise* adalah koalisi yang terbentuk berdasarkan kompromi dan setiap aktor yang terlibat nyaman dengan posisi yang mereka miliki. *Quid pro quo arrangement* adalah

pembentukan koalisi untuk mendapatkan *win win solution*. *Implicit or explicit coercion* adalah suatu pemaksaan secara langsung atau tidak *langsung*, yaitu intimidasi, ancaman, perhatian media, manipulasi peraturan, atau cara lain untuk melemahkan oposisi atau kemungkinan kompromi terhadap posisi pilihan mereka.

f. Subversion and *equalizer*

Subversion and equalizer adalah aktor yang membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan, apakah kebijakan tersebut bertolak belakang atau tidak dengan aturan yang telah berlaku sebelumnya.

g. The games

The games adalah salah satu prosedur dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor (Valerie M. Hudson, 2014).

2. *Output*

Berbeda dengan analisis penjelasan mikro yang sangat tertarget, keluaran ini masuk dalam kategori penjelasan dengan fokus analisis yang jauh lebih besar. Kategori penjelasan ini mencakup analisis tingkat sistem internasional.

1.7 Argumen Sementara

Uni Eropa termasuk dalam organisasi internasional. Penelitian ini membahas proses pembuatan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tahun 2014-2019 dengan menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* Valerie M. Hudson pada

kategori *Bureaucratic Politics*. Kelompok-kelompok yang memiliki otoritas politik dalam negeri, pertemuan kelompok-kelompok kecil yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan ciri-ciri pribadi anggota kelompok yang penting bersatu membentuk politik birokrasi. Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia bahwa sanksi tersebut merupakan kebijakan yang di ambil Uni Eropa pasca terjadinya aneksasi Krimea pada tahun 2014.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Studi pada bidang ini menggunakan studi kualitatif. (Bogdan and Biklen, 2007) mengatakan, studi kualitatif ialah salah satu cara dalam studi untuk mendapatkan penjelasan tentang ucapan atau perilaku suatu subjek yang dapat diamati atau dapat diperoleh melalui dokumen (Rahmat, 2009).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai lembaga internasional, Uni Eropa menjadi objek dan Rusia menjadi subjek dalam penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Studi ini memakai data sekunder yang dapat diperoleh melalui berbagai literatur, yaitu jurnal, buku, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan studi kasus dalam studi ini. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis studi kasus dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Data untuk studi ini dapat diperoleh melalui studi literatur. Penulis akan memilih data yang sangat relevan terhadap studi kasus dalam studi ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab satu berisi latar belakang yang menjelaskan kronologi singkat konflik internal di Ukraina dan Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur yang relevan, kerangka konseptual, argumentasi kerja, metodologi penelitian, dan sistem penelitian.

BAB 2 SEJARAH RUSIA, UKRAINA, KRIMEA, DAN STRUKTUR UNI EROPA

Bab dua menjelaskan sejarah Rusia, Ukraina dan Krimea dan struktur Uni Eropa.

BAB 3 PROSES PEMBUATAN SANKSI UNI EROPA TERHADAP RUSIA

Bab tiga menjelaskan proses pembuatan sanksi oleh Uni Eropa terhadap Rusia.

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab empat menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dipaparkan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

Sejarah Rusia, Ukraina, Krimea, dan Struktur Uni Eropa

2.1 Konflik antara Rusia dan Ukraina atas Aneksasi di Krimea

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina sudah terjadi sejak lama. Saat ini, Kiev, ibu kota Ukraina, berfungsi sebagai pusat geografis wilayah terpadu yang juga mencakup Belarus dan Rusia. Pada abad kesepuluh, wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai Kyivan Rus sebagai hasil kesepakatan perdagangan dan pertambangan antara Dinasti Kievan dan Konstantinopel. Karena ditetapkannya perjanjian ini, masyarakat Kyivan Rus mulai memeluk agama Kristen Ortodoks dan menolak agama Katolik Roma yang diberikan kepada mereka oleh orang-orang dari negara tetangga Polandia. Wilayah Kyivan Rus terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil berdasarkan agama, ras, dan bahasa setelah kematian penguasa Yaroslav the Wise, dan hal ini menyebabkan pecahnya konflik. Serangan Kekaisaran Mongol antara tahun 1237 dan 1240 semakin memperumit masalah dengan memaksa wilayah Kyivan Rus terpecah-pecah. Sebelum Kekaisaran Rusia merebut kembali wilayah bekas Kyivan Rus pada tahun 1782 (Michael, 1996). kerajaan Lituania dan Polandia memanfaatkan pemisahan ini untuk menyebarkan agama Katolik Roma. Namun sejak saat itu, terdapat kesenjangan yang mencolok antara wilayah timur dan barat Ukraina. Sebagian besar wilayah Ukraina bagian timur beragama Kristen Ortodoks dan berbahasa Rusia, sedangkan sebagian besar wilayah Ukraina bagian barat beragama Katolik dan berbahasa Ukraina (Hamm Michael F 1996).

Setelah Kekaisaran Rusia jatuh dan Uni Soviet terbentuk pada tahun 1917, konflik juga terjadi di Ukraina. Dalam upayanya mencapai kemerdekaan, negara

yang sebelumnya dikenal sebagai Republik Nasional Ukraina berperang melawan pemerintahan Bolshevik yang baru dibentuk. Menurut (Zhukovsky Arkadii 1993). pihak Ukraina menderita kekalahan telak dalam perang yang berakhir pada tahun 1921. Selain itu, bagian barat Ukraina dimiliki oleh Polandia, sementara sebagian besar wilayah Ukraina termasuk Krimea, Kuban, dan lainnya milik Uni Soviet. (Zhukovsky Arkadii 1993).

Identitas Ukraina dan Rusia yang pernah dimiliki bersama telah diubah oleh perselisihan dan perang dramatis yang terjadi antara kedua negara. (Kuzio 2003) Rusia memandang dirinya sebagai negara yang mengikuti gagasan *Odin Narod*, yang diterjemahkan menjadi "Satu Bangsa" dalam bahasa Rusia. Artinya wilayah dan negara yang pernah menjadi bagian dari Kyivan Rus, seperti Ukraina dan Belarus, kini menjadi bagian dari Rusia dan kemungkinan besar akan bersatu kembali. Sementara itu, masyarakat Ukraina memandang diri mereka sebagai negara berdaulat yang berbeda dari Rusia, dengan bahasa dan budaya mereka sendiri (Kuzio 2003).

Sebagai wilayah utama dalam konfrontasi antara Rusia dan Ukraina, Krimea memiliki masa lalu yang unik. Setelah invasi bangsa Mongol pada tahun 1240, semenanjung ini berada di bawah kekuasaan mereka selama dua abad berikutnya hingga diserahkan ke Turki dalam Perang Mongol-Utsmaniyah. Pada tahun 1783, Krimea direklamasi oleh Rusia (Orest 1988). Krimea adalah salah satu wilayah yang paling bergejolak selama Perang Dunia II, ketika Kekaisaran Rusia berubah menjadi Uni Soviet, karena terdapat perpecahan yang begitu tajam antara penduduk Rusia—yang mendukung Uni Soviet dan penduduk Mongol (Tatar)—yang mendukung Uni Soviet. mendukung Ukraina dan Jerman. Setelah Uni Soviet

merebut kembali Krimea, komunitas Tatar dipindahkan secara paksa ke Siberia pada masa pemerintahan Joseph Stalin (Orest 1988).

Dalam upaya menjalin hubungan yang lebih erat antara rakyat Ukraina dan Uni Soviet, Nikita Krushchev memindahkan Krimea ke Ukraina pada masa pemerintahannya (Goldberg 1992). Bahkan setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Krimea tetap menjadi bagian dari Ukraina. Masalah ekonomi di Ukraina, yang diwujudkan dalam bentuk utang pemerintah sebesar US\$ 140 miliar, dimulai pada bulan November 2013, menandai dimulainya krisis Ukraina. Pada saat itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych mempunyai dua pilihan: menerima bantuan pinjaman sebesar 827 miliar dolar AS dari UE sebagai imbalan atas kesediaannya untuk bergabung dengan UE, atau menerima bantuan pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dari Rusia dengan imbalan pengurangan dalam harga gas alam. Harga per seribu meter kubik awalnya antara \$400 dan \$268. Tiga kali—pada tanggal 21 November, 29 November, dan 15 Desember—perjanjian untuk bergabung dengan Uni Eropa ditunda karena harus mengambil keputusan di antara dua pilihan sebelumnya. Bantuan moneter yang sebelumnya ditawarkan Rusia akhirnya dibahas dalam pertemuan gabungan antara Yanukovych dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 17 Desember. Pinjaman tersebut secara resmi diterima pada 24 Desember (Margareth 2017).

Diperkirakan 800.000 orang berkumpul di Lapangan Kemerdekaan Kiev dari bulan November hingga Desember 2013 untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka kepada pemerintah (BBC 2017). Yang juga termasuk dalam protes anti-pemerintah adalah pembongkaran patung Vladimir Lenin. Kolektif komunitas dan kelompok kepentingan ini dikenal sebagai blok Maidan/Euromaidan. Pada 17

Januari, Yanukovych mengeluarkan dekrit yang melarang demonstrasi anti-pemerintah sebagai tanggapan atas semakin banyaknya orang yang berpartisipasi dalam Maidan dan demonstrasi untuk menggulingkan Yanukovych dari kekuasaan. Protes pertama pada tanggal 22 Januari berakhir dengan kematian tiga orang, dan situasi antara Maidan dan polisi berubah menjadi anarki setelah dikeluarkannya undang-undang ini. Pada saat yang sama ketika hal ini mendorong UE untuk mengecam tindakan pemerintah Ukraina dan meningkatkan hubungan antara kedua kelompok, kejadian ini juga berdampak pada pertemuan puncak perundingan UE-Ukraina (Margareth 2017).

Parlemen di Ukraina memilih untuk menghapuskan sebagian dari undang-undang anti-protes dan memberikan amnesti untuk meyakinkan para pengunjung rasa agar meninggalkan negara tersebut menyusul demonstrasi yang meluas di Eropa dan Amerika, serta pengunduran diri Perdana Menteri Mykola Azarov pada tanggal 28 Januari. Di sisi lain, para pengunjung rasa ' pendudukan Lapangan Kemerdekaan Kiev terus berlanjut. Dalam kerusuhan yang terjadi pada bulan Februari, 67 orang kehilangan nyawa dan 77 orang ditahan oleh pihak berwenang (Margareth 2017).

Selain itu, pada 21 Februari, Yanukovych memulai negosiasi dengan para pemimpin protes; hal ini berlanjut hingga tanggal 22 Februari, ketika dia menghilang, bertepatan dengan keputusan parlemen Ukraina yang memecatnya sebagai presiden karena gagal menjaga stabilitas negara. Pada 25 Mei, bersamaan dengan persiapan penurunan pangkat, presiden baru akan dilantik. Hingga tiga pengumuman dibuat oleh parlemen Ukraina pada tanggal 23-26 Februari, terdapat kekosongan pemerintahan. Sebagai permulaan, kita memiliki Olexander Turchynov

dan Arseniy Yatsenyuk, masing-masing nama presiden sementara dan perdana menteri. Poin kedua, kematian dalam kerusuhan tersebut disebabkan oleh pembubaran pasukan elit polisi Berkut. Terakhir, poin ketiga adalah sikap pemerintah Ukraina terhadap kursus bahasa Rusia. Masyarakat di wilayah Ukraina yang sehari-harinya menggunakan bahasa Rusia atau sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Russophone, turun ke jalan sebagai bentuk protes setelah mendengar berita ini (Margareth 2017).

Setelah perang dalam negeri di Ukraina pecah pada bulan November 2013, aneksasi Semenanjung Krimea pun dimulai. Alun-alun di Kiev, ibu kota Ukraina, yang dikenal sebagai Maidan Nezalezhnosti, adalah lokasi pertempuran. Tindakan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich, yang memilih untuk membatalkan perjanjian yang telah lama direncanakan dengan Uni Eropa, menjadi katalisator konflik tersebut. Kekhawatiran terhadap keamanan nasional Ukraina mendorong keputusan untuk mengakhiri kerja sama (Nauli 2019). Dengan suara terbanyak pada bulan Februari 2010, Viktor Yanukovich yang pro-Rusia dinyatakan sebagai pemenang. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan cepat memihak Ukraina dan bersahabat dengan Yanukovich. Hal ini terlihat ketika dalam pertemuan di Moskow, Rusia pada 17 Desember 2010, Putin menandatangani perjanjian dana talangan dengan Ukraina sebesar US\$ 15 miliar (sekitar Rp 1.771,18 triliun) untuk mengatasi krisis ekonomi Eropa. Putin telah meminta Yanukovich untuk mengabaikan kesepakatan Asosiasi dengan UE, yang akan dilaksanakan pada KTT Kemitraan Timur di Vilnius, Lituania, dan kesepakatan ini adalah hasil dari permintaan tersebut. Namun, sejak tahun 1995, Ukraina secara aktif menjalin hubungan dan meningkatkan keraguan mengenai keanggotaannya di UE. Pada awal

tahun 2005, rincian mengenai keanggotaan mulai muncul, dan pembicaraan mengenai perjanjian yang mencakup zona perdagangan bebas, kadang-kadang dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang Dalam dan Komprehensif (DCFTA), dan kerja sama yang lebih erat terus berlanjut. Pada tahun 2007 terjadi aktivitas yang signifikan di sektor energi. Akhirnya, pada 21 November 2013, pemerintahan baru di bawah Viktor Yanukovych memutuskan untuk menunda penandatanganan Perjanjian Asosiasi UE-Ukraina.

Pada tanggal 29 November 2013, pada KTT Kemitraan Timur di Vilnius, Lituania, yang dihadiri oleh delegasi dari UE dan enam bekas republik Soviet lainnya, presiden secara resmi menolak menandatangani pakta kerja sama. Sejak acara tersebut ditunda, masyarakat Ukraina telah melakukan protes karena hal ini, meskipun 56% masyarakat mendukung perjanjian tersebut. Pada sesi ke-6 Komite Kerja Sama Antarpemerintah Rusia-Ukraina, yang berlangsung di Moskow, Rusia pada tanggal 17 Desember 2013, Presiden Viktor Yanukovich dan Presiden Vladimir Putin mencapai kesepakatan, dengan kedua pemimpin menandatangani empat belas artikel kerja sama "Rencana Aksi Bersama". Rusia telah menyetujui konsesi lebih lanjut mengenai biaya gas, sehingga menurunkan harga dari \$400 USD menjadi hanya 268,5 USD per 1.000 meter kubik, sebagai bagian dari sejumlah perjanjian penting mengenai dukungan Rusia kepada Ukraina. Kedua, menurut Muhammad (2015), pemerintah Rusia memilih membeli obligasi dari Ukraina dengan menggunakan 495 miliar rubel, yaitu 15 miliar dolar AS (Muhammad 2015).

Masalah pasokan energi adalah titik fokus lain dalam hubungan antara Rusia dan Ukraina, yang juga disoroti oleh kesepakatan tersebut.

Beberapa jaringan pipa yang membawa minyak dan gas Rusia ke Eropa Barat melewati Ukraina. Rusia adalah pemasok utama gas alam ke Eropa. Barang-barang Ukraina yang sebagian besar diekspor ke Rusia meliputi logam besi, pelat dan pipa baja, peralatan listrik, peralatan mesin, makanan, dan barang-barang sektor kimia. Barang-barang Ukraina dengan nilai tambah tinggi menemukan pasar yang menjanjikan di sana. Dengan total lebih dari US\$ 2047 juta penanaman modal asing yang diterima oleh perekonomian Ukraina pada tahun 1998, Rusia menduduki peringkat keempat investor terbesar, di belakang Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman. Rusia dan Ukraina telah menyelesaikan perbedaan mereka dan kini bekerja sama untuk menyelesaikan semua kesulitan. Namun kerja sama antara kedua negara mulai memburuk hingga upaya terbaru Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Putin menyatakan persetujuannya terhadap rencana keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, meskipun Yushchenko memberikan jaminan kepada Rusia bahwa keputusan Ukraina untuk bergabung dengan NATO bukanlah tindakan anti-Rusia. Keputusan yang diambil oleh Ukraina, bagaimanapun, dipandang oleh semua faksi di Rusia sebagai sebuah perubahan yang secara alami pro-Barat dan anti-Rusia. Karena hal ini menimbulkan rasa permusuhan dan menyebabkan Rusia memandang Ukraina dengan kurang baik, hal ini tidak dapat diterima. Jelas terlihat bahwa kekecewaan rakyat Ukraina terhadap pemerintahnya dipicu oleh kemitraan antara Rusia dan Ukraina. Akibatnya, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan Presiden Viktor Yanukovich. Rusia dengan keras menentang pemecatan

Yanukovych dari jabatannya hingga 1 Maret 2014, ketika Rusia berhasil melakukan manuver untuk menyerang Ukraina dengan meminta dan menerima persetujuan dari parlemennya.

Dengan jumlah pemilih sebesar 83,1%, 96,8% pemilih ingin menjadi subjek Federasi Rusia dalam referendum yang melanggar hukum yang berlangsung pada 16 Maret di wilayah Republik Otonomi Krimea dan kotamadya Sevastopol yang terpisah. Ada pelanggaran besar dalam referendum, sehingga hasilnya tidak ada artinya. Tujuan mereka satu-satunya adalah untuk mempermalukan keputusan Rusia yang memisahkan Krimea dari Ukraina. Pada tanggal 18 Maret, Moskow secara resmi mengumumkan bahwa Republik dan Sevastopol, yang membentuk Krimea, telah dianeksasi ke Federasi Rusia. Sampai saat ini, Kyiv belum mengakui keputusan ini. Konsekuensi ekonomi dari hilangnya kekayaan negara di semenanjung tersebut, termasuk sektor energi dan pertambangan serta infrastruktur pelabuhan, yang penting bagi eksportir Ukraina, terkait dengan signifikansi geopolitik dan militer Krimea, dampaknya terhadap kancah politik dalam negeri, dan dampaknya terhadap perekonomian. hilangnya kekayaan negara secara keseluruhan. Meskipun aneksasi Rusia atas Krimea mungkin merupakan keberhasilan propaganda di dalam negeri, hal ini telah merugikan negara tersebut secara politik (dunia kini memandang Rusia sebagai negara yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi) dan secara finansial (sebuah perkiraan menyebutkan total biaya aneksasi mencapai \$82 miliar) (Olszanska et al. 2014). Protes di Ukraina meningkat dalam beberapa bulan terakhir, sebagian disebabkan oleh keputusan pemerintah yang menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa.

Mykola Azarov, perdana menteri Ukraina, mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 28 Januari 2014, setelah ia dan pejabat pemerintah lainnya menyerah pada serangan gencar pengunjuk rasa pro-Uni Eropa (Muhammad 2015). (Bebler 2015) pengambilalihan Krimea merupakan operasi secepat kilat yang melibatkan beberapa bentuk dominasi, termasuk kekuatan militer dan propaganda serta disinformasi yang disebarkan melalui media. Menanggapi gelombang protes anti-pemerintah terbaru yang dikenal sebagai Euromaidan, Rusia mengambil tindakan untuk merebut Krimea, menunjukkan bahwa mereka selalu mempunyai suara di Ukraina. Disebutkan bahwa Rusia mungkin berusaha merusak stabilitas Ukraina, tetapi juga disebutkan bahwa ketegangan mereda dengan terpilihnya Victor Yanukovych sebagai presiden pada tahun 2010.

Terjadi kekosongan kekuasaan di Ukraina setelah Yanukovych meninggalkan negara tersebut pada tanggal 22 Februari 2014 karena masalah internal (Bebler 2015). Demonstrasi pro-Rusia diadakan di ibu kota Krimea, Simferopol, pada tanggal 26 Februari. Sebagai perdana menteri, Sergey Aksyonov seorang anggota parlemen dan pemimpin Partai Persatuan Rusia diangkat pada tanggal 27 Februari setelah orang-orang bertopeng dan bersenjata menguasai gedung-gedung pemerintah Krimea. Personil militer Rusia menyita beberapa gedung militer, bandara, dan media pada tanggal 28 Februari, sebuah fakta yang berulang kali dibantah oleh Putin. Mereka juga mengganggu lalu lintas yang menghubungkan Krimea dengan Ukraina (Matzek 2016).



Gambar 2.1 Penandatanganan Perjanjian Bersatunya Wilayah Republik Krimea dan Kota Sevastopol dengan Rusia pada tanggal 18 Maret
Sumber: (Matzek 2016).

Sejumlah negara menanggapi intervensi militer Rusia dan pernyataan resmi bahwa Krimea kini menjadi bagian dari Rusia dengan cara yang berbeda-beda. Perdana Menteri Sementara Ukraina Arseniy Yatsenyuk membuat pernyataan yang mengklaim bahwa Rusia telah mencuri Krimea, sebuah wilayah yang menjadi hak milik Ukraina, sebagai reaksi pertama dari negara yang menolak mengakui kehilangannya (Smith and Eshchenko 2014). Poin kedua, PBB telah menyampaikan belasungkawa dan kekecewaannya atas tindakan Rusia terhadap Ukraina melalui Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon. Tindakan ini termasuk campur tangan terhadap kedaulatan dan aneksasi Ukraina, dan atlas resmi PBB masih menganggap Krimea sebagai bagian dari Ukraina (Margareth 2017).

2.2 Uni Eropa

Bersamaan dengan 27 negara Eropa lainnya, Uni Eropa telah menciptakan persatuan politik dan ekonomi yang unik. Semuanya dimulai pada akhir Perang Dunia II, ketika para pendirinya berpikir bahwa mengoordinasikan produksi batu bara dan baja-dua senjata utama-akan menjadi cara terbaik untuk menjaga perdamaian. Di dalam Uni Eropa, negara-negara anggota berkewajiban sesuai dengan serangkaian perjanjian yang telah mereka tandatangani. Setiap negara anggota harus mencapai kesepakatan tentang perjanjian-perjanjian ini, dan kemudian parlemen atau rakyat mereka harus meratifikasinya. Enam negara anggota merupakan pemrakarsa Uni Eropa. Sebagai hasil dari ekspansi lebih lanjut, jumlah negara anggota yang membentuk Uni Eropa sekarang ialah 27. Negara-negara demokrasi yang stabil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan supremasi hukum adalah prasyarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Ekonomi pasar dan pemerintah yang mampu menegakkan dan mengawasi peraturan Uni Eropa adalah prasyarat tambahan untuk keanggotaan. Atas upayanya untuk mewujudkan Eropa yang lebih demokratis, damai, dan manusiawi, Uni Eropa dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2012 (“EU Glance” 2023).

Uni Eropa menempati posisi yang unik antara negara federal dan organisasi internasional. 'Organisasi supranasional' adalah istilah yang digunakan dalam sektor hukum. Salah satu ciri khas Uni Eropa adalah bahwa negara-negara anggotanya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan mereka sambil bergabung untuk meningkatkan pengaruh dan kekuatan gabungan mereka. Untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, penggabungan

kedaulatan memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis di tingkat Eropa dengan mengizinkan Negara-negara Anggota untuk mengalihkan sebagian wewenang pengambilan keputusan mereka ke organisasi yang dibentuk bersama. Pada dasarnya ada tiga badan di dalam Uni Eropa: yaitu: (“EU Glance” 2023).

1. Parlemen Eropa, yang mewakili warga negara Uni Eropa dan dipilih langsung oleh mereka;
2. Dewan Eropa;
3. Dewan Uni Eropa, yang mewakili masing-masing Negara Anggota;
4. Komisi Eropa, yang mewakili kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan.

Parlemen Eropa

Para pemilih di Uni Eropa memilih parlemen baru setiap lima tahun. Saat ini, 705 perwakilan dari 27 negara anggota UE membentuk Parlemen Eropa. Menurut (“EU Glance” 2023) alih-alih duduk di blok nasional, anggota EP diorganisasikan ke dalam partai politik Eropa.

Menyetujui undang-undang yang mengatur Eropa adalah fungsi utama Parlemen Eropa. Tugas ini dibagi antara Parlemen Eropa dan Dewan UE, dan Komisi Eropa mengusulkan undang-undang yang diusulkan. Merupakan tugas bersama Parlemen Eropa dan Dewan UE untuk menyetujui anggaran tahunan Uni Eropa. Menurut (“EU Glance” 2023) Ombudsman Eropa, yang dipilih oleh Parlemen Eropa, menangani keluhan warga mengenai tidak efektifnya pengelolaan lembaga-lembaga UE.

Luksemburg adalah rumah bagi kantor administratif “Sekretariat Jenderal” Parlemen Eropa. Sidang pleno Parlemen Eropa diadakan di Strasbourg, Perancis,

dan kadang-kadang di Brussels, Belgia. Di Brussel juga diadakan sesi komite.

Tanggung jawab Parlemen Eropa dalam hal legislasi meliputi:

1. mengesahkan UU bersama dewan UE, berdasarkan proposal dewan UE;
2. memutus perjanjian internasional;
3. meninjau program kerja komisi dan mengusulkan UU.

Sedangkan tugas pengawasan Parlemen Eropa terdiri dari:

1. Mengawasi semua institusi UE;
2. Memilih presiden komisi dan memutuskan komite sebagai badan atau tidak;
3. Menyetujui anggaran;
4. Memeriksa petisi warga;
5. Membahas moneter dengan bank sentral eropa.

Menentukan apakah undang-undang harus disetujui di tingkat Eropa merupakan fungsi utama Parlemen Eropa. Meskipun Komisi Eropa mengusulkan usulan undang-undang, Parlemen Eropa dan Dewan UE mempunyai tugas yang sama. Setiap tahun, anggaran UE disetujui bersama oleh Parlemen Eropa dan Dewan UE. Selain itu, Parlemen Eropa mempunyai wewenang untuk menunjuk Ombudsman untuk menangani keluhan masyarakat mengenai tidak efektifnya pengelolaan lembaga-lembaga Uni Eropa.

Dewan Eropa

Kepala negara atau pemerintahan dari 27 negara anggota Uni Eropa, bersama dengan Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa, membentuk Dewan Eropa, badan politik tertinggi Uni Eropa. Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan mengambil bagian dalam

pertemuan Dewan Eropa. Dewan Eropa bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan sasaran UE secara menyeluruh. Frekuensi pertemuan adalah dua kali setiap enam bulan. Perjanjian Lisbon secara resmi membentuk Dewan Eropa pada tahun 2009, tahun dimana Dewan Eropa mulai berlaku (“EU Glance” 2023).

Dewan Uni Eropa

Para menteri dari setiap negara anggota UE membentuk Dewan UE. Para menteri yang bertanggung jawab atas topik-topik yang dibahas adalah mereka yang sering hadir dalam pertemuan-pertemuan ini. Seluruh kebijakan UE tercakup dalam sepuluh konfigurasi Dewan UE yang berbeda. Pendekatan 'mayoritas yang memenuhi syarat' biasanya digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam bidang perpajakan, misalnya, digunakan “pemungutan suara dengan suara bulat” (di mana semua suara setuju) untuk subjek tertentu. Sebanyak lebih dari 150 "Badan persiapan Dewan" kelompok kerja dan komite spesialis membantu Komite Perwakilan Tetap (Coreper) dalam melaksanakan tugasnya (“EU Glance” 2023).

Bandingkan dengan Dewan Eropa, organisasi UE lainnya di mana para pemimpin UE berkumpul sekitar empat kali setahun; badan ini dikenal sebagai Dewan UE. Ada perbedaan antara Dewan Uni Eropa dan Majelis Eropa (juga dikenal sebagai Dewan Eropa), badan lain yang bukan anggota UE. Perundang-undangan dan keputusan kebijakan merupakan tanggung jawab bersama antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Inisiatif kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan kolektif di dalam Uni Eropa sebagian besar diawasi oleh Dewan UE, sesuai dengan arahan strategis yang ditetapkan oleh Dewan (“EU Glance” 2023).

Komisi Eropa

Mewakili dan melindungi kepentingan Eropa adalah tugas Komisi Eropa, badan eksekutif UE. Tidak ada hubungan antara pemerintah nasional dan Komisi Eropa. Ke-27 Komisararis, satu dari masing-masing negara anggota UE, bertindak sebagai pimpinan politik organisasi tersebut. Dewan Komisararis terdiri dari Presiden Komisi Eropa, delapan Wakil Presiden (salah satunya adalah Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan), dan delapan belas Komisararis. Aspek-aspek tertentu dari kebijakan UE ditugaskan kepada masing-masing Komisararis. Sekitar 33.000 pegawai pemerintah, yang sebagian besar berbasis di Brussels (“EU Glance” 2023), menjaga agar Komisi Eropa berfungsi dengan lancar setiap hari.

Komisi Eropa bertanggung jawab untuk mengusulkan undang-undang baru untuk Uni Eropa dan membawanya ke kedua majelis parlemen. Setiap hari, Komisi Eropa mengawasi alokasi anggaran UE dan pelaksanaan kebijakan UE. Komisi Eropa, bersama dengan Pengadilan Eropa, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua negara anggota UE menerapkan semua undang-undang UE dengan benar. Selain kantor pusatnya di Brussel, Komisi Eropa memiliki perwakilan di masing-masing negara anggota UE dan kantor di Luksemburg (“EU Glance” 2023).

Garis waktu sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dapat dilihat di bawah ini. Secara keseluruhan, Dewan Eropa mengecam tindakan agresif Rusia terhadap Ukraina sebagai pengabaian terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014 Dewan Eropa menanggukkan kerjasama *Partnership and Cooperation Agreement* terhadap Rusia dalam *extraordinary Foreign Affairs Council* (FAC) (“Council of The European Union” 2014).

Pada tanggal 17 Maret 2014, Dewan Uni Eropa menetapkan sanksi dalam keputusan dewan dan Peraturan Dewan Uni Eropa yaitu sanksi 21 *travel bans and assets freeze* (“Council Decision” 2014).

Dewan Eropa menyerukan Komisi Eropa untuk mengusulkan pembatasan ekonomi, perdagangan, dan keuangan mengenai Krimea. Pada tanggal 27 Mei, 27 Juni dan 16 Juli 2014 Kepala Negara atau Pemerintahan Uni Eropa (dewan Eropa) mencatat bahwa persiapan yang dilakukan oleh Komisi, EEAS dan Negara-negara Anggota mengenai kemungkinan tindakan yang ditargetkan sedang dilakukan sehingga langkah lebih lanjut dapat diambil. diambil tanpa penundaan. Selanjutnya pada tanggal 17 juli 2014 *European council* menambahkan tindakan pembatasan pada investasi di Krimea dan Sevastopo dalam pertemuan dewan eropa

Tindakan pembatasan terhadap Rusia di empat bidang ekonomi kemudian disepakati oleh FAC pada tanggal 30 Juli 2014. Penjualan peralatan dan pelarangan teknologi untuk ekstraksi minyak, gas, dan mineral, serta investasi baru di bidang energi, transportasi, dan telekomunikasi di Sevastopol dan Krimea.

Teknologi sensitif tertentu, khususnya dalam industri minyak, tunduk pada pembatasan, dan terdapat embargo terhadap perdagangan persenjataan dan larangan ekspor komoditas dengan tujuan ganda militer dan pengguna akhir. Lembaga keuangan milik negara Rusia juga menghadapi pembatasan akses mereka ke pasar modal Uni Eropa. Masa sanksi dimulai pada tanggal 17 Maret dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2015, sedangkan masa sanksi dimulai pada tanggal 31 Juli 2014.

BAB 3

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENERAPAN SANKSI UNI EROPA TERHADAP RUSIA PASCA ANEKSASI KRIMEA TAHUN 2014

3.1 Proses Pengambilan Keputusan dalam Penerapan Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Pasca Aneksasi Krimea

Pada bab III akan menjelaskan tentang proses pembuatan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dan mengapa Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia Pasca aneksasi Krimea tahun 2014 dengan menggunakan prespektif *Bureaucratic Politics Models* pada teori *Foreign Policy Analysis* Valerie M. Hudson. Politik Birokrasi merupakan gabungan dari beberapa entitas pembuat kebijakan, termasuk namun tidak terbatas pada kelompok kecil, kelompok proses organisasi yang memiliki pengaruh politik dalam negeri, dan ciri-ciri kepribadian yang ditunjukkan oleh anggota organisasi tersebut. Terkait dengan penerapan sanksi oleh Uni Eropa terhadap Rusia, hukuman tersebut merupakan kebijakan yang diambil Uni Eropa setelah invasi Rusia ke Krimea pada tahun 2014.

Ketika mengkaji alasan di balik pilihan diplomasi suatu negara, gagasan tentang politik birokrasi berpusat pada dua poin utama. Fokus utama yang pertama adalah berisikan tentang model pengambilan keputusan suatu negara dengan melihat model birokrasi dari negara tersebut. Konsep *Bureaucratic Politics Models* memiliki delapan variabel yang digunakan untuk menentukan sebuah keputusan. Delapan variabel tersebut terdiri setiap proses birokrasi suatu keputusan negara

yang dilihat dari: *stakeholder, action channels, framing resultans, levers of manipulation, coalition, subversion and equalizer, dan the games.*

Analisis konsep *bureaucratic politics* dalam teori *Foreign Policy Analysis*

Valerie M. Hudson terdiri dari:

3.1.1 *Stakeholder*

Aktor yang mempunyai kepentingan peran, keahlian, wilayah, atau kekuatan politik dan kepentingan yang kuat memungkinkan mereka untuk mempengaruhi hasil birokrasi. Mereka yang memiliki kekuatan politik dapat mengalahkan klaim atas pemangku kepentingan berdasarkan peran yang orang lain miliki. Orang yang memiliki peran dapat mengalahkan klaim atas pemangku kepentingan berdasarkan keahlian yang org lain miliki. Afiliasi di organisasi akan sangat menentukan sikap yang diambil dalam proses negosiasi birokrasi dan dapat berpengaruh terhadap output dari birokrasi tersebut.

Analisis pemangku kepentingan mengenai penerapan sanksi UE terhadap Rusia mengungkapkan bahwa sanksi tersebut merupakan kebijakan yang diadopsi oleh UE setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014. UE terdiri dari badan-badan berikut: Parlemen Eropa, yang dipilih langsung oleh warga negara UE; Dewan Eropa; Dewan UE, yang mewakili kepentingan masing-masing Negara Anggota; dan Komisi Eropa, yang mewakili kepentingan UE secara keseluruhan. Jadi, sebagai lembaga supranasional, UE mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada negara-negara kuat. Sayangnya, penelitian mengenai sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa (UE) sebagai badan supranasional masih sangat

sedikit, dan sebagian besar materi yang tersedia berfokus pada hukuman yang diprakarsai atau didukung oleh AS (Weber & Schneider, 2022). Namun, penelitian sanksi baru menunjukkan bahwa PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat semakin beralih menggunakan sanksi sebagai alat untuk merespons kebijakan pada saat krisis global (Bapat dkk., 2013).

Keputusan untuk menerapkan sanksi pertama terhadap Rusia sejak berakhirnya Perang Dingin hanya dapat diambil pada tingkat politik tertinggi, karena hal ini berdampak pada kepentingan utama kebijakan luar negeri nasional serta secara dramatis mengubah kebijakan Uni Eropa terhadap Rusia. Dewan Eropa merupakan tingkat politik tertinggi dalam proses pembuatan sanksi terhadap Rusia. Sanksi dapat dirancang secara lengkap oleh dewan Uni Eropa, setelah dewan Eropa berkoordinasi dengan FAC dan parlemen dalam proses pembuatan sanksi.

Dewan Eropa mengeluarkan *statement* terkait aneksasi Krimea dan akan melakukan langkah-langkah untuk menghentikan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia. dewan Eropa melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal; melakukan pertemuan dengan anggota G7 untuk membekukan keanggotaan Rusia dalam G8 dan mendesak dewan Uni Eropa untuk segera merancang sanksi setelah ada hasil dari pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak dan setelah ada *statement* yang dikeluarkan oleh dewan Eropa.

3.1.2 *Action channel*

Pada analisis *action channel* merupakan aktor yang harus mengetahui apa yang harus aktor lakukan, prosedur seperti apa dan ke pihak mana selama proses pengambilan keputusan agar dapat menjadi efektif.

Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa bersama-sama bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang dan mengambil keputusan mengenai berbagai kebijakan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan beberapa entitas yang terlibat dalam penerapan sanksi UE terhadap Rusia. Inisiatif kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan kolektif di dalam Uni Eropa sebagian besar diawasi oleh Dewan UE, sesuai dengan pedoman strategis yang ditetapkan oleh Dewan (“EU Glance”, 2023).

Dewan Eropa banyak mengambil alih dalam proses pembuatan dan penerapan sanksi terhadap Rusia, karena keputusan untuk menerapkan sanksi pertama terhadap Rusia hanya dapat diambil pada tingkat politik, yaitu dewan Eropa. Dewan Uni Eropa dapat merancang sanksi untuk Rusia setelah keputusan telah terbentuk oleh parlemen Eropa, dewan Eropa, dan FAC (). Mayoritas anggota UE dan dewan Eropa mengecam aneksasi yang dilakukan oleh Rusia. mereka juga setuju dengan penerapan sanksi tersebut, sehingga sanksi tersebut diberlakukan.

Sanksi tahap pertama diberlakukan pada awal Maret 2014. Para pemimpin UE (dewan Eropa) terlebih dahulu berkoordinasi tindakan mereka dengan mitra internasional dan FAC (*Foreign Affairs Council configuration*) dan memutuskan bersama negara-negara G7 lainnya untuk menanggukhan keanggotaan Rusia di G8. Sanksi kedua terlaksana pada 6

Maret 2014, Dewan Eropa berkoordinasi dengan FAC dan parlemen Eropa dan dalam menanggukkan kerjasama *Partnership and Cooperation Agreement* terhadap Rusia membekukan aset milik beberapa orang yang dicurigain memiliki peran penting dalam aneksasi Krimea. Dewan Uni Eropa Bersama komisi Uni Eropa melakukan pertemuan yang membahas sanksi secara lengkap untuk Rusia dalam aspek ekonomi dan perdagangan, setelah dewan Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Sanksi ketiga diberlakukan pada Juli 2014. Dewan Eropa dan FAC setuju untuk mempercepat persiapan lebih lanjut. Dewan Uni Eropa merancang kembali sanksi untuk Rusia setelah dewan Eropa melakukan pertemuan dengan FAC. Sanksi tersebut sesuai dengan pertemuan Dewan Eropa pada 16 Juli 2014. Dewan setuju untuk melakukan penguatan tindakan terhadap Rusia di empat sektor ekonomi, menyusul kesimpulan dari Kepala Negara dan Pemerintahan. Pada tanggal 31 Juli 2014, Uni Eropa mengadopsi Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, yang memberlakukan sanksi ekonomi pada tanggal 1 Agustus 2014 (Keputusan Dewan 2014/512/CFSP). Destabilisasi kawasan Donbas oleh Rusia mendorong Uni Eropa memutuskan untuk menerapkan sanksi ekonomi. Dalam Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, Uni Eropa secara resmi meminta Rusia untuk memindahkan tentara tambahannya dari wilayah perbatasan dan menghentikan masuknya senjata, peralatan, dan militan ke perbatasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan deeskalasi yang segera dan nyata.

Sanksi ekonomi, sebuah taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan politik dalam konflik internasional melalui alasan ekonomi, adalah bentuk

sanksi tersebut. Uni Eropa menerapkan sanksi bersama-sama dengan alat-alat lain, seperti wacana politik dan kebijakan pelengkap, untuk mencapai tujuan kebijakannya yang lengkap dan terintegrasi.

3.1.3 *Resultant*

Aktor-aktor yang berperan dalam birokrasi politik seringkali enggan menyebut hasil politik birokrasi sebagai “keputusan”. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan terakhir yang telah disepakati. Keputusan tersebut dapat berubah secara bertahap sebagai penyempurnaan dari keputusan sebelumnya

Proses penerapan sanksi yang dilakukan oleh Uni Eropa mengalami perkembangan selama rentan waktu 2014-2019. Sanksi tersebut berkembang dari aspek teknologi, pembekuan aset terhadap warga negara Rusia dan organisasi atau perusahaan Rusia yang terlibat dalam aneksasi Krimea, pembatasan ekspor dan impor, dan sebagainya.

3.1.4 *Levers of manipulator*

Para *stakeholders* yang efektif dalam birokrasi besar tidak hanya mengetahui semua *action channels*, tapi aktor tersebut juga ahli dalam melakukan manipulasi birokrasi. Alat manipulasi yang paling penting adalah framing, aturan, *deadline*, pengendalian informasi, dan agenda untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kebijakan sanksi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kebangkitan Uni Eropa (UE) di kancah dunia dalam 20 tahun terakhir. Setiap tindakan hukuman yang digunakan harus selalu masuk akal

dalam kaitannya dengan tujuan. Selain itu, tindakan pembatasan harus mempertimbangkan tanggung jawab internasional UE dan negara-negara anggotanya, serta Perjanjian WTO. Karena pengecualian terhadap prinsip pasar bersama yang didasarkan pada pergerakan uang bebas dan liberalisasi perdagangan Uni Eropa menerapkan sanksi ekonomi dan keuangan dengan hati-hati. Mungkin perlu untuk membatalkan atau mengaktifkan ketentuan penangguhan dalam perjanjian yang ada dengan negara asing sebelum hukuman dapat diterapkan. Peninjauan atau kadaluarsa adalah komponen penting lainnya dari sanksi atau tindakan pembatasan yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Tindakan independen UE memastikan bahwa sanksi dicabut atau ditinjau dan diubah berdasarkan perkembangan (Council 2008).

Dewan Eropa dalam pertemuan G7 berhasil dalam melakukan negosiasi dengan anggota G7 untuk menanggukkan kehadiran Rusia dalam pelaksanaan G8. Dewan Eropa dalam setiap pertemuan membahas sanksi terhadap Rusia, mengatakan bahwa dewan Eropa mengecam Tindakan Rusia dan menyatakan “penerapan sanksi akan berdampak buruk bagi perekonomian UE, namun UE tetap bersatu dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita”

Di Uni Eropa, pertemuan khusus Dewan Eropa menegaskan kembali keputusan FAC dan menekankan perlunya penerapan tindakan yang direncanakan. Agar siap menerapkan tindakan tambahan jika situasi memburuk, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa telah meminta agar Komisi Eropa dan EEAS memprioritaskan persiapan larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Alat manipulasi mencakup beberapa hal, *framing, rules, deadline, the control of information*, dan agenda untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- a. *Framing* adalah proses aktor dalam memahami suatu situasi dan menentukan pengambilan keputusannya. *Framing* lebih penting untuk dipelajari dalam politik birokrasi dibandingkan proses pengambilan keputusan akhir, karena pilihan dibatasi oleh kerangka yang diadopsi oleh kelompok. Beasley menemukan bahwa suatu kerangka kerja dapat diadopsi jika kerangka tersebut sederhana, didukung oleh pemimpin yang kuat atau anggota kelompok yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut, dan jika kerangka tersebut dapat memberikan kerangka kerja yang cukup jelas. Aspek lainnya adalah apakah kerangka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkembangan bertahap dari apa yang telah dilakukan di masa lalu. Kerangka kerja, setelah diadopsi, cenderung “ditetapkan” dengan cukup cepat, dan mungkin diperlukan penambahan personel baru ke dalam struktur birokrasi untuk memikirkan kembali kerangka kerja yang sudah lama ada. Hal ini terlihat bahwa pada akhir Desember 2014, Dewan Uni Eropa mengadopsi sekitar 30 tindakan hukum yang memberlakukan tindakan pembatasan (sanksi) terhadap Federasi Rusia. Semua tindakan Dewan yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia secara ringkas dapat dibagi menjadi tindakan dasar dan tindakan tambahan. Tindakan dasar termasuk keputusan dan peraturan yang meluncurkan jenis sanksi tertentu (individu, Krimea dan Sevastopol, dan sanksi ekonomi). Tindakan tambahan adalah keputusan dan

peraturan yang digunakan untuk mengubah dan memperbarui tindakan dasar. Semua tindakan lainnya (Keputusan Dewan, Keputusan Pelaksanaan Dewan, Peraturan Dewan, Peraturan Pelaksanaan Dewan) termasuk dalam Tindakan Tambahan.

- b. *Rules* berkaitan dengan birokrasi juga cukup berpengaruh dalam melakukan manipulasi, apakah pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas atau menggunakan *principle of unanimity*. Kebulatan suara (*unanimity*) di Uni Eropa, keputusan harus disetujui oleh semua Negara Anggota UE, merupakan salah satu aturan pemungutan suara yang berlaku di Dewan (*the council*). Dewan (*the council*) harus memberikan suara dengan suara bulat mengenai sejumlah bidang kebijakan yang dianggap sensitif oleh Negara-negara Anggota.
- c. *Deadline*: Anggota kelompok yang kurang berkuasa dapat menggunakan *deadline* sebagai pengaruh untuk mendapatkan konsesi (izin atau tuntutan) dari anggota yang lebih berkuasa. Anggota yang lebih berkuasa dapat menggunakan *deadline* dan dapat mengatur *deadline* yang singkat untuk anggota kelompok yang kurang berkuasa.
- d. *The control of information*, aktor yang memiliki informasi dapat mengontrol informasi, seperti informan harus menyerahkan informasi untuk atasannya. Ia memiliki “kekuasaan” untuk memberikan informasi yang ingin aktor bagi dan tidak memberikan informasi yang tidak ingin aktor berikan.

- e. Agenda: ketua dapat memutuskan agenda apa yang akan dibahas di suatu pertemuan. Namun agenda juga bias terlaksa berdasarkan voting dari anggota. Ketua bias membatasi agenda yang akan dibicarakan.

Varibel tersebut dapat memanipulasi penerapan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia yang terdiri dari beberapa tahap pertama sanksi diperkenalkan pada awal Maret 2014. Para pemimpin Uni Eropa pertama kali berkoordinasi tindakan mereka dengan mitra internasional dan memutuskan dengan negara G7 lainnya untuk menanggihkan Keanggotaan Rusia di G8. *An extraordinary Foreign Affairs Council (FAC)* pertemuan ini mengusulkan, sesuai dengan keputusan G7, negara anggota UE dengan keanggotaan G8 menanggihkan keikutsertaan mereka dalam aktivitas terkait dengan persiapan KTT Sochi G8 Juni 2014. Penanggihan pembicaraan bilateral dengan Rusia tentang masalah visa serta tentang Perjanjian baru yang menggantikan yang lama Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Pertemuan luar biasa Dewan Eropa menguatkan keputusan FAC dan dikonfirmasi bahwa tindakan yang diantisipasi harus dilaksanakan segera.

Tahap kedua sanksi diperkenalkan setelah referendum status Krimea. Menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul kembali di Brussels dan memutuskan sesuai dengan keputusan sebelumnya dari Kepala Negara dan Pemerintah, untuk memberlakukan pembatasan perjalanan dan pembekuan aset terhadap 21 orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang merusak atau mengancam integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina.

Daftar orang dalam pembatasan perjalanan dan pembekuan aset terus diperluas. Sementara itu, Dewan Eropa meyerukan Komisi Eropa untuk mengusulkan pembatasan ekonomi, perdagangan, dan keuangan mengenai Krimea. Dewan Eropa juga memutuskan untuk membatalkan KKT Uni Eropa Rusia dan selanjutnya mencatat bahwa negara-negara anggota UE tidak akan mengadakan KTT reguler bilateral. Berdasarkan keputusan itu, Foreign Affairs Council (FAC) sepakat bahwa impor barang yang berasal dari Krimea atau Sevastopol ke Uni Eropa harus dilarang (Szep, 2019).

Sanksi tahap ketiga diperkenalkan setelah jatuhnya penerbangan MH17 di Juli 2014. FAC sepakat untuk mempercepat persiapan lebih lanjut sanksi sesuai dengan pertemuan Dewan Eropa 16 Juli. Menyusul kesimpulan Kepala Negara dan Pemerintahan, Dewan sepakat untuk mengambil tindakan pembatasan terhadap Rusia di empat sektor ekonomi. Investasi baru di Krimea dan Sevastopol dalam transportasi, telekomunikasi dan energi serta penjualan peralatan dan teknologi untuk eksploitasi minyak, gas, dan mineral juga dilarang (Szep, 2019)

3.1.5 *Coalitions*

Aktor dapat membentuk koalisi dengan actor lain. Ada tiga cara dalam membentuk koalisi antara lain:

a. *Compromise*

Koalisi yang terbentuk berdasarkan kompromi dan setiap anggota nyaman dengan posisi yang mereka miliki.

b. *Quid pro quo arrangement*

Koalisi ini dilakukan untuk mendapatkan *win win solution* dalam mendapatkan posisi yang nyaman untuk setiap anggota.

c. *Implicit or explicit coercion*

Pemaksaan secara langsung atau tidak langsung, yaitu intimidasi, ancaman, perhatian media, manipulasi peraturan, atau cara lain untuk melemahkan oposisi atau kemungkinan kompromi terhadap posisi pilihan mereka.

Pada koalisi ini, Uni Eropa melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. Kasus aneksasi yang dilakukan oleh Rusia menimbulkan banyak penolakan dari beberapa pihak khususnya Uni Eropa dan NATO serta Amerika. Kedua belah pihak tidak ingin melepaskan pengaruhnya terhadap Ukraina hingga keduanya memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Ukraina. Setelah itu pihak Uni Eropa memberikan sanksi Ekonomi terhadap Rusia, namun sanksi yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Rusia (Fahmi and Utomo, 2020).

Negara-negara anggota G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat), Uni Eropa, dan Australia pada tanggal 2 Desember 2022 mengumumkan kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu. untuk menetapkan harga maksimum minyak mentah asal Rusia yang diangkut melalui laut sebesar US\$60 per barel, yang berlaku efektif pada tanggal 5 Desember 2022. Bersamaan dengan tanggal berlakunya pembatasan harga, Koalisi Pembatasan Harga melarang berbagai layanan termasuk asuransi maritim dan perdagangan keuangan terkait dengan transportasi laut (termasuk transportasi itu sendiri) minyak mentah asal Federasi Rusia (“minyak Rusia”) kecuali pembeli membeli minyak dengan harga atau di bawah US\$60 per barel. Mereka yang membeli minyak Rusia pada atau di bawah batas harga akan mempertahankan akses ke beragam layanan negara *Price Cap Coalition* yang penting bagi perdagangan minyak (Morrison, 2022).

Sementara itu, Federasi Rusia telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan menjual minyak ke negara-negara yang mematuhi batasan harga dan akan mengurangi produksi minyaknya, jika diperlukan. Penentangan Rusia, kegagalan negara-negara pengimpor minyak utama lainnya untuk menyetujui pembatasan harga, dan sifat baru dari mekanisme sanksi ini, telah membuat para pelaku pasar gelisah tentang bagaimana menerapkan pembatasan harga, menghindari penghindaran sanksi, dan menanggapi kebijakan tersebut. fluktuasi harga apa pun sebagai akibat dari pembatasan tersebut (Morrison 2022).

3.1.6 *Subversion and Equalizer*

Individu mengambil inisiatif tanpa berkonsultasi dengan orang lain dan mengabaikan aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Terbukti dari Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, yang memberlakukan sanksi ekonomi, bahwa senjata, barang dan teknologi penggunaan ganda, eksplorasi minyak dan teknologi produksi tertentu, serta bantuan barang dan teknologi yang termasuk dalam daftar umum militer. Peraturan Dewan (UE) 833/2014 melengkapi langkah-langkah ini dengan meletakkan dasar untuk berbagi informasi di antara negara-negara anggota UE dan memberi negara-negara tersebut wewenang untuk menjatuhkan denda atas pelanggaran terhadap batasan dan larangan tertentu. Rusia telah terpukul keras oleh langkah-langkah pembatasan Uni Eropa, yang didasarkan pada Peta Sanksi Uni Eropa. Ini termasuk larangan ekspor senjata, impor senjata, ekspor barang dengan kegunaan ganda, target sanksi keuangan, larangan barang lain, dan pembatasan layanan.

Langkah-langkah pembatasan harus sering ditinjau ulang untuk memperhitungkan situasi saat ini, menurut resolusi Dewan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU), peluang untuk menentang sanksi yang diusulkan di pengadilan ada di bawah hukum Uni Eropa. Mahkamah Agung Uni Eropa menilai keabsahan tindakan legislatif dan tindakan Dewan.

3.1.7 *The games*

Pada poin ini penulis membahas prosedur dalam pembuatan suatu keputusan. Tingkat atas justru yang merancang suatu keputusan atau tingkat atas hanya menyetujui atau meminta amandemen dalam suatu keputusan. Berbagai tahapan sanksi yang dikenakan terhadap Rusia oleh Uni Eropa relevan di sini. Pada tanggal 31 Juli 2014, Uni Eropa menerapkan sanksi untuk Rusia. Sesuai dengan Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan Uni Eropa No.833/2014, Uni Eropa memberlakukan pembatasan terhadap hubungan ekonomi Rusia. Sanksi tersebut mencakup larangan terhadap teknologi tertentu, embargo perdagangan senjata, larangan mengekspor komoditas dengan tujuan ganda militer dan penggunaan akhir, dan pembatasan akses ke pasar modal Uni Eropa untuk lembaga keuangan milik negara Rusia. Pembatasan ini sangat parah khususnya pada industri minyak. Sanksi UE mencakup peninjauan atau masa berlaku dapat diubah dan direvisi sesuai kebutuhan.

Karena nilai-nilai yang dianut bersama, Uni Eropa sering kali terlibat dalam perselisihan yang membahayakan perdamaian dan stabilitas internasional. Setelah terbentuk di ECSC, identitas UE diformalkan dalam Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan kebijakan luar negerinya, yang pada gilirannya mempengaruhi sanksi ekonomi UE dan kodifikasi prinsip-prinsip UE. Alasannya, ekspor UE ke Rusia dapat digunakan untuk menyebarkan perselisihan di semenanjung Krimea, itulah sebabnya tindakan ini diterapkan (Fahmi, 2020).

Uni Eropa memberlakukan sanksi sektoral terhadap Rusia, termasuk embargo senjata, sebagai respons atas keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina yang dimulai pada awal tahun 2014. Sanksi ini diadopsi melalui Keputusan Dewan Uni Eropa 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan Uni Eropa No. 833/2014, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014. Embargo tersebut telah diperpanjang berturut-turut dari jangka waktu semula pada tanggal 31 Juli 2015 hingga saat ini. Keputusan Dewan (CFSP) 2020/2143 tanggal 17 Desember 2020 dan Peraturan Dewan Uni Eropa No. 833/2014 merupakan perubahan terakhir terhadap dokumen ini, yang berlaku hingga 31 Juli 2021. Peraturan tersebut terakhir diubah pada tanggal 5 Juli 2019 oleh Komisi Pelaksana Komisi Regulation (EU) 2019/1163 yang diterbitkan pada 8 Juli 2019 dan mulai berlaku pada 9 Juli 2019.

Dapat dikatakan bahwa sanksi Uni Eropa tidak efektif. Penulis menyimpulkan bahwa pembatasan ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat tidak membuahkan hasil karena Rusia tidak menghentikan invasinya. Hal ini sesuai dengan teori bahwa hukuman ekonomi tidak selalu berhasil mengubah perilaku atau kebijakan target. Sanksi ekonomi gagal setidaknya karena tiga alasan, menurut penulis. Masalah utamanya adalah ketergantungan negara-negara lain pada pasokan energi Rusia. Kekuatan minyak dan gas Rusia melancarkan respons terhadap negara-negara pengirim dalam kondisi seperti ini. Potensi gangguan terhadap pasokan energi negara pengirim mungkin berdampak negatif pada perekonomian negara tersebut. Meskipun demikian, sanksi ekonomi tidak dapat berdampak pada Rusia. Rusia dapat dianggap kebal terhadap sanksi ekonomi karena negara tersebut sudah

sering terkena dampaknya. Perekonomian Rusia masih tangguh dan bisa pulih dari dampak sanksi. Sebagai seorang pemimpin, Putin kuat, tangguh, dan tak kenal lelah dalam mencapai tujuannya; ini, sebagai aspek ketiga, adalah karakter pribadinya. Selain itu, Putin telah menjadi pemimpin Rusia selama hampir 20 tahun, dan selama itu ia menjabat sebagai perdana menteri dan presiden.

Rusia dapat dianggap kebal terhadap sanksi ekonomi karena negara tersebut sudah sering terkena dampaknya. Perekonomian Rusia masih tangguh dan bisa pulih dari dampak sanksi. Sebagai seorang pemimpin, Putin kuat, tangguh, dan tak kenal lelah dalam mencapai tujuannya; ini, sebagai aspek ketiga, adalah karakter pribadinya. Selain itu, Putin telah menjadi pemimpin Rusia selama hampir 20 tahun, dan selama itu ia menjabat sebagai perdana menteri dan presiden (Zulfa, et.al, 2022).

Pada tahap pertama, ditentukan bahwa tiga industri penting Rusia akan dikenakan sanksi ekonomi yang ditargetkan. Rusia masih belum melakukan apa yang diminta UE, meski sanksi ekonomi akan segera berakhir. Sejak Rusia gagal memenuhi persyaratan keringanan sanksi sebanyak delapan kali antara tahun 2016 dan 2019, Uni Eropa tetap mempertahankan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Ada banyak variabel yang mempengaruhi perekonomian suatu negara, sehingga sulit untuk mengukur dampak pasti dari sanksi ekonomi. Menurut Gurvich (2018), sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa antara tahun 2014 dan 2017 mengurangi PDB Rusia sekitar 2,2–2,5 persen. Meskipun hal ini terjadi, IMF menghitung bahwa sanksi memiliki

dampak sebesar 0,2% terhadap tingkat pertumbuhan PDB Rusia antara tahun 2014 dan 2018 (Korhonen, 2019).

Berdasarkan angka-angka ini, nampaknya sanksi ekonomi tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan PDB Rusia. Namun, untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Rusia tidak terlalu menderita, sanksi ekonomi tidak dimaksudkan untuk memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Rusia. Untuk mencegah sanksi membahayakan stabilitas perekonomian UE, sanksi tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dampak buruk terhadap Rusia lebih besar dibandingkan dampak negatif terhadap UE (Christie, 2016). Sebaliknya, dampak sanksi terhadap industri yang terkena sanksi akan mempunyai konsekuensi jangka menengah dan panjang bagi Rusia. Akibat sanksi ekonomi, industri militer Rusia mengalami kekurangan beberapa komoditas. Sektor pertahanan Rusia bergantung pada teknologi asing untuk hampir 640 komoditas berbeda, meskipun faktanya Rusia adalah produsen independen senjata dan peralatan militer lainnya (Russell, 2016).

Industri pertahanan Rusia akan tertinggal dibandingkan pesaingnya dalam jangka menengah dan panjang karena pembatasan ekonomi di sektor pertahanan, yang membuat Rusia sulit mendapatkan pasokan pengganti. Dampak sanksi sektor perbankan terhadap perekonomian Rusia sudah jelas terlihat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa memutus akses lembaga keuangan besar Rusia ke pasar UE. Akibatnya, beberapa perusahaan Rusia terpaksa melakukan pembayaran segera dalam skala besar terhadap utang luar negeri mereka. Rusia berhutang total sebesar 104 miliar USD, jumlah yang sama dengan tahun 2014 (Parlemen Eropa, 2014).

Dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam perekonomian secara keseluruhan berkurang karena sanksi menyebabkan peningkatan arus modal keluar

(Connolly, 2015). Jika Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya memperpanjang sanksi mereka, hal ini akan berdampak signifikan pada kesehatan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang dari bank-bank dan perusahaan-perusahaan besar Rusia. Sanksi mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap industri energi. Perusahaan minyak besar Rusia sering bergantung pada perusahaan barat seperti Schlumberger, Baker Hughes, dan Halliburton dalam hal teknologi dan layanan guna mengelola proyek minyak dan menjaga produktivitas tetap tinggi (Russell, 2016). Dunia usaha Rusia merasa lebih sulit untuk memperoleh teknologi dan layanan yang dikembangkan oleh negara-negara Barat karena adanya pembatasan. Dalam jangka menengah dan panjang, perusahaan-perusahaan minyak utama Rusia akan menjadi kurang produktif karena sulitnya mendapatkan sumber teknologi dan layanan pengganti.

Mengingat hal-hal di atas, jelas bahwa Rusia tidak terkena dampak ekonomi yang parah akibat sanksi ekonomi UE. Meskipun demikian, sanksi akan semakin melemahkan beberapa sektor dalam jangka menengah dan panjang karena dampaknya terhadap industri tertentu. Oleh karena itu, sanksi ekonomi UE merupakan contoh nyata dari pembatasan fungsi sanksi, dan perpanjangan sanksi tersebut pasti akan melemahkan Rusia dari waktu ke waktu dan memberi tekanan pada Rusia untuk mengubah perilakunya terhadap Ukraina.

Terkait isu aneksasi Rusia terhadap wilayah Semenanjung Krimea, penulis mengambil kesimpulan bahwa sanksi ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia tidak efektif setelah melalui seluruh proses perumusan sanksi, pelaksanaan, dampak, hingga hasil akhir. Fakta bahwa sikap Rusia terhadap kepemilikan Krimea tidak berubah meskipun telah dikenakan sanksi ekonomi selama 31 bulan adalah

bukti ketidakefektifan tindakan tersebut. Bila tujuan sanksi ekonomi yang dikenakan tidak tercapai maka dikatakan tidak efektif. Rusia telah dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa dengan harapan akan mengembalikan Semenanjung Krimea ke dalam kendali Ukraina. Tujuan yang tidak tercapai (Siregar, 2017).

Pada akhirnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa sanksi ekonomi UE gagal karena dua alasan. Pertama, UE dan Rusia sama-sama memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Kebijakan Uni Eropa yang “bermusuhan” tidak hanya merugikan Rusia. Meski perekonomian Rusia terpuruk, namun negara tersebut tidak tinggal diam. Mengingat sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Rusia mempertimbangkan cara untuk melakukan pemulihan. Secara khusus, tujuh strategi diterapkan oleh Rusia. Para pejabat Rusia memanfaatkan sumber daya alam yang sangat besar di negaranya dengan menjajaki mitra kerja sama potensial di luar Uni Eropa. Selain itu, Semenanjung Krimea penting bagi Rusia karena alasan lain. Diketahui bahwa Semenanjung Krimea telah menjadi rumah bagi Armada Laut Hitam, stasiun militer Rusia, sejak tahun 1977. Rusia memiliki kepentingan di semenanjung Krimea karena posisi geografisnya yang penting dan hubungan budaya yang mendalam dengan Krimea. Inilah dua poin utama yang menurut penulis dapat menjelaskan mengapa Rusia masih membela Krimea, meskipun faktanya negara tersebut terkena dampak sanksi ekonomi yang berat. Hal ini mendorong Rusia mengambil sejumlah langkah untuk menghidupkan kembali perekonomiannya yang lesu dan mendapatkan kembali kendali atas Semenanjung Krimea.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Uni Eropa adalah organisasi internasional yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sebagai reaksi terhadap aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014. Sanksi tersebut telah melewati perkembangan hingga tahun 2019. Proses pengambil keputusan dalam penerapan sanksi tersebut dianalisis menggunakan teori *bureaucratic politics* dari Valerie Hudson.

Konsep *Bureaucratic Politics* memiliki dua fokus utama dalam menganalisis sebuah keputusan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Fokus pertama, menjelaskan tentang model pengambilan keputusan suatu negara dengan melihat model birokrasi dari negara tersebut. Konsep *Bureaucratic Politics Models* memiliki tujuh variabel yang digunakan dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Tujuh variabel tersebut terdiri setiap proses birokrasi suatu keputusan negara yang dilihat dari: *stakeholder, action channels, resultant, levers of manipulation, coalitions, subversion and equalizer* dan *the games*. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian tujuh variabel tersebut adalah proses pengambilan keputusan dalam penerapan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, melewati proses yang cukup panjang.). Sanksi tersebut telah melewati banyak perkembangan atau modifikasi keputusan dan aturan digunakan untuk membuat tindakan tambahan. Proses tersebut melibatkan semua struktur dalam Uni Eropa, anggota-anggota Uni eropa, dan pihak eksternal. Uni Eropa juga melakukan tindakan tambahan mencakup semua tindakan tambahan, termasuk antara lain

Keputusan Dewan, Keputusan Pelaksanaan Dewan, Peraturan Dewan, dan Peraturan Pelaksanaan Dewan. Di Uni Eropa, Parlemen Eropa, yang dipilih langsung oleh warga UE dan mewakili kepentingan mereka, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, yang mewakili masing-masing Negara Anggota, dan Komisi Eropa, yang mewakili Uni Eropa. kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan, merupakan contoh pemangku kepentingan yang berperan dalam organisasi

Fokus kedua dari teori tersebut merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan dalam penerapan sanksi oleh Uni Eropa terhadap Rusia. hasil tersebut, yaitu bentuk sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa didasarkan pada Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan (UE) No. 833/2014, yang tertuang dalam berbagai Sanksi UE (sanksi ekonomi, sanksi yang dikenakan terhadap Krimea dan Sevastopol, dan sanksi yang dikenakan terhadap individu. Namun sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia dapat dikatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa tidak membuahkan hasil. Rusia terkena sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Uni Eropa; namun sanksi tersebut kurang berdampak terhadap kebijakan luar negeri Rusia.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran:

1. Bagi Uni Eropa, Mengingat beberapa negara anggota Uni Eropa adalah mitra dagang utama Rusia, yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada perekonomian mereka dalam hal ekspor, maka perlu bagi Uni Eropa untuk menentukan jenis sanksi apa yang masih relevan dalam kondisi saat ini. Hal

ini diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi tersebut efektif, dan bukan hanya untuk menjatuhkan Rusia dari sisi ekonomi.

2. Akibat letak geografis Ukraina yang berbatasan dengan Uni Eropa di sebelah barat dan Rusia di sebelah timur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perjanjian yang akan mencegah semua pihak untuk terlibat dalam tindakan kekerasan, mengintimidasi satu sama lain, atau memprovokasi satu sama lain. Selain itu, perjanjian tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk para pemrotes dan negara masing-masing. Selain itu, ada kebutuhan untuk klarifikasi lebih lanjut mengenai pelucutan senjata, serta pembentukan zona penyangga antara Rusia dan Ukraina, untuk membuat situasi menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bogdan, Robert, and Sari Knopp Biklen. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Boston: Pearson A & B.
- Hamm Michael F. 1996. *Kiev a Potrait, 1800-1917*. Princeton University Press.
- Indonesia, CNN. 2022. *Uni Eropa Tetapkan Sanksi Ekonomi Baru Atas Rusia*. Jakarta: CNN.
- Hufbauer, Gary Clyde, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg. 2007. *Economic Sanctions Reconsidered*. Peterson Institute.
- Matzek, Jan. 2016. *Annexation of Crimea by the Russian Federation*. Policy Paper.
- Orest, Subtelny. 1988. *Ukraine: A History, Toronto: University of Toronto Press*.
- Sastroamidjojo, Ali. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Batara.
- United Nation. 2015. "Death Toll in Ukraine Conflict Exceeds 5,000, May Be 'considerably Higher' – UN." News.Un.Org. 2015.
- Valerie M. Hudson. 2014. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Md.

B. Jurnal

- Abi, Ida Bagus Nindya Wasista, Putu Tuni Cakabawa Landra, and Anak Agung Sri Utari. 2015. "Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (3): 1–7.
- Alexseev, Mikhail A. 2016. "Backing the USSR 2.0: Russia's Ethnic Minorities and Expansionist Ethnic Russian Nationalism." In *The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000-15*. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474410427.003.0007>.
- Bebler, Anton. 2015. "Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict." *Romanian Journal of European Affairs*.
- Blockmansa, Steven. 2015. "Crimea and the Quest for Energy and Military Hegemony in the Black Sea Region: Governance Gap in a Contested Geostrategic Zone." *Journal of Southeast European and Black Sea*. <https://doi.org/10.1080/14683857.2015.1060016>.
- Charron, Austin. 2016. "Whose Is Crimea?: Contested Sovereignty and Regional Identity." *Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia* 5 (2): 225–56. <https://doi.org/10.1353/reg.2016.0017>.

- Emmers, Ralf. 2009. *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia*.
Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia.
<https://doi.org/10.4324/9780203875018>.
- Fahmi, Salma Afifa, and Tri Cahyo Utomo. 2020. "Analisis Keberlangsungan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia Yang Dianggap Menganeksasi Krimea Periode 2014-2019." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 6 (4): 598–607.
- Goldberg, L.R. 1992. "The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure." *Psychological Assessment* 4 (1): 26–42.
- Kuzio, T. 2003. "The EU and Ukraine: Neighbor, Partner, Member? Russia and Eurasia Review." *Russia and Eurasia Review* 2 (16): 2–3.
- Mamfaluthy. 2014. "Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina." *Al-Ijtima'i* 1 (1): 29–40.
- Muhammad, Fadhly. 2015. "Kebijakan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych Menolak Menandatangani EU-Ukraine Association Agreement Dengan Uni Eropa Tahun 2013." *Jom FISIO* 2 (2).
- Olszanska, A.N, A Biesiada, A.S Letowska, and A.Z Kucharska. 2014. "Characteristics of Organic Acids in The Fruit of Different Pumpkin Species, Food Chemistry." *Brazilian Journal of Food Technology* 148: 415–19.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif." *Journal Equilibrium* 5 No. 9: 1–8
- Ruziq, Yazid. 2022. "Peran Uni Eropa dalam Resolusi Konflik Rusia dengan Ukraina Tahun 2014-2019," no. March.
- Shagina, Maria. 2017. "EU Sanctions Policy Towards Post-Soviet Conflict: Cases of Crimea, Eastern Ukraine, South Ukraine, South Ossetia, and Abkhazia." *Revista Unisci*, 43: 73–87.
- Shulman, Stephen. 2004. "The Contours of Civic and Ethnic National Identification in Ukraine." *Europe - Asia Studies*.
<https://doi.org/10.1080/0966813032000161437>.
- Smith, Matt, and Alla Eshchenko. 2014. *Ukraine Cries "Robbery" As Russia Annexes Crimea*. CNN. 18 Maret 2014.
- Szep, Viktor. 2019. "New Intergovernmentalism Meets EU Sanctions Policy: The European Council Orchestrates the Restrictive Measures Imposed against Russia." *Journal of European Integration*.
<https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1688316>.
- Teper, Yuri. 2016. "Official Russian Identity Discourse in Light of the Annexation of Crimea: National or Imperial?" *Post-Soviet Affairs*.
<https://doi.org/10.1080/1060586X.2015.1076959>.
- Westerlund, Fredrik, and Johan Norberg. 2016. "Military Means for Non-Military Measures: The Russian Approach to the Use of Armed Force as Seen in

Ukraine.” *Journal of Slavic Military Studies*.
<https://doi.org/10.1080/13518046.2016.1232560>.

Yesilot, Okan. 2014. “The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics.” *Insight Turkey* 16 (2): 167–82.

Zhukovsky Arkadii. 1993. “Ukrainian Autocephalous Orthodox Church.” *Encyclopedia of Ukraine* 5: 464.

C. Website

BBC. 2017. “Russia Country Profile.” 2017.

Council Decision. 2014.

Council, European. 2008. “Council of the European Union.” 2008.

Council of The European Union. 2014. 2014.

DW. 2022. “Latar Belakang Konflik Ukraina Dan Invasi Rusia Ke Donbas.”

[Www.Dw.Com](http://www.dw.com). 2022.

EU Glance. 2023.

GMNI. 2014. “No Title.” 2014.

Kompas. 2014. “No Title.” 2014.

Morrison. 2022. “Coalition Powers Impose Russian Oil Price Cap and Outline Implementation.”

Newsviva. 2014. “No Title.” 2014.

Vibiznews. 2014. “No Title.” 2014.

Vovworks. 2014. “No Title.” 2014.

D. Skripsi

Margareth, Fitri Kamelia. 2017. *Identitas Dalam Hubungan Internasional: Dilema Kebijakan Luar Negeri Finlandia Dalam Krisis Ukraina 2014*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Nauli, Siregar Mirza Farhan. 2019. *Intervensi Rusia Di Ukraina Selama Revolusi Euromaidan Pada Tahun 2013-2017*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.